



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2021 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS	5.	BANTEN RAYA
3.	KABAR BANTEN ✓	6.	

JANUARI	MEI	SEPTEMBER	2022
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
8 MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	

Pemkab Harap Dapat Opini WTP ke-11

SERANG, (KB)-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten, Senin (7/3/2022). Usai menjadi yang pertama menyerahkan LKPD di antara kabupaten dan kota se-Banten, Pemkab Serang menargetkan bisa meraih opini WTP ke-11.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah berharap, Pemkab Serang akan kembali meraih opini WTP, yakni yang ke-11 kali. "Insyaallah (optimistis), rasanya kami kan sudah memeriksa juga ke bawah ke tim semua OPD rasanya sih tidak ada penyimpangan di 2021. Mudah-mudahan kami bisa meraih WTP lagi dan tentunya tanpa catatan. Karena target kami tanpa catatan. Progresnya sudah bagus, masa jadi turun lagi ada catatan," katanya.

Laporan keuangan yang diserahkan tersebut, ujar dia, menunjukkan, bahwa pemkab terkait menyelenggarakan keuangan sudah sesuai aturan dan standar. "Seperti disampaikan alhamdulillah 10 tahun berturut-turut kami dapat opini WTP, ini menunjukkan kami sudah ada di track yang benar dan memenuhi standar akuntansi yang ada. Beberapa tahun terakhir opini kita tanpa catatan, apresiasi saya kepada tim penyusun LKPD yang terus punya semangat untuk terus perbaiki kinerja termasuk laporan keuangan," ujarnya.

Ia berharap, beberapa krite-



BUPATI Serang Ratu Tatu Chasanah saat menandatangani berita acara penyerahan LKPD kepada Perwakilan BPK Provinsi Banten, Senin (7/3/2022).*

ria yang ditetapkan BPK bisa dipenuhi oleh Kabupaten Serang, sehingga Kabupaten Serang bisa mengungkapkan semua kegiatan keuangannya dengan lengkap.

Ia menuturkan, Kabupaten Serang menjadi yang pertama di antara kabupaten dan kota se-Banten. Sebab pada prinsipnya dalam bekerja lebih cepat lebih baik. "Supaya pertanggungjawaban 2021 langsung dikerjakan begitu selesai disampaikan. Karena BPK juga harus mengerjakan tujuh kabupaten dan kota lain serta provinsi kalau kami bisa berurutan mungkin pekerjaan beliau tidak terlalu numpuk," ucapnya.

Dalam penyerahan tersebut, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah didampingi juga oleh Sekda Kabupaten Serang

Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Asda I Nanang Supriatna, Asda II Hamdani, Asda III Ida Nuraida, Plt Inspektur Rudy Suhartanto, Plt Kepala Bapenda Mohamad Ishak Abdul Rouf, dan Kepala BPKAD Sarudin. Sementara, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Novie Irawati Herni Purnama mengatakan, hingga hari ini (kemarin) Kabupaten Serang menjadi yang pertama menyerahkan LKPD di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan untuk Provinsi Banten sudah menyerahkan pada Senin (7/2/2022). "Jadi setelah provinsi, Kabupaten Serang adalah entitas kedua. Tapi di antara kabupaten dan kota, Kabupaten Serang adalah entitas pertama yang menyerahkan LKPD untuk dilakukan pemeriksaan dua bulan ke de-

pan," tuturnya kepada **Kabar Banten** sesuai menerima LKPD dari Bupati Serang di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten.

Ia mengatakan, jika tidak ada kendala pada Sabtu (7/5/2022) pihaknya akan menyerahkan LHP LKPD kepada DPRD Kabupaten Serang dan Pemkab Serang. Setelah menerima LKPD ini, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terinci. "Sekarang masih memeriksa internal pendahuluan, insyaallah akan berakhir pada 10 Maret. Nanti setelah diterima ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci 28 hari. Terus proses penyusunan laporan dan lainnya, sehingga di 7 Mei LHP LKPD akan kami serahkan ke DPRD dan Pemkab Serang," katanya.

Ia menuturkan, pemeriksaan

selama dua bulan sejak LKPD diterima yang dilakukan BPK sudah sesuai ketentuan, sedangkan untuk pemkab sebenarnya kewajiban menyampaikan laporan paling lambat tiga bulan setelah penggunaan anggaran, yaitu Kamis (31/3/2022). "Tapi Kabupaten Serang dengan segala upaya yang dilakukan bupati mendorong seluruh jajarannya, sehingga bisa selesaikan LKPD lebih cepat hampir sebulan lebih cepat. Ini kami apresiasi pada semua yang sudah dilakukan jajaran khususnya kepada bupati," ujarnya.

Ia mengatakan, ada banyak hal yang akan diperiksa oleh BPK terhadap LKPD tersebut, di antaranya LRA atau laporan realisasi anggaran, neraca, LAK atau laporan akuntabilitas kinerja, CALK atau catatan atas laporan keuangan. "Ada tujuh yang dinilai. Atas laporan keuangan tersebut. Kami ada kriteria untuk mengeluarkan opini. Mulai dari kecukupan pengungkapan, efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan undang-undang, kesesuaian standar akuntansi pemerintahan. Itu jadi kriteria kami untuk menghasilkan opini, apabila semua sudah sesuai. Maka ada beberapa opini yang akan disampaikan, yakni WTP, WDP, dan tidak memberi opini," ucapnya.

Ia mengatakan, Kabupaten Serang sudah 10 tahun berturut-turut sudah mendapat opini WTP, yakni sejak 2011 sampai 2020. "Untuk 2021 kita lihat hasilnya. Kami akan memeriksa dengan standar pemeriksaan yang kami punya," tuturnya. **(H-48)*****